

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki banyak ukuran dalam penilaian. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Keberadaan BUMDes dalam pemberdayaan sosial masyarakat sebagai alternatif kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Program BUMDes dalam menjalankan program memberikan ruang untuk dapat keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, evaluasi sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang sudah terlaksana.<sup>1</sup>

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi

---

<sup>1</sup> Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2018), 23.

desar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.<sup>2</sup>

Suatu desa diharapkan mampu mengelola secara mandiri potensi dan sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri melalui berbagai bentuk partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, jika jika pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, BUMDes menjadi potensi yang dapat digunakan sebagai indikator peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa. BUMDes adalah salah satu bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian desa dengan berbagai macam kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat dan gotong royong. BUMDes termasuk salah satu jenis usaha yang memenuhi kriteria dari SAK EMKM yaitu usaha mikro kecil dan menengah karena yang dikelola BUMDes kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat desa bukan mencari keuntungan semata.<sup>3</sup>

Pembentukan BUMDes Dasawarsa *Corporation* Desa Waru Barat Kec. Waru Kab. Pamekasan tidak hanya meniru dari desa-desa lain akan tetapi juga sesuai terhadap potensi masyarakat desa setempat, potensi desa atau kekayaan yang dimiliki oleh desa. Keberhasilan BUMDes tidak hanya dilihat dari berapa lama BUMDes itu berjalan akan tetapi dilihat juga dari kontribusi BUMDes pada

---

<sup>2</sup> Edy Yusuf Agunggunanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usa Milik Desa (BUMDe)," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, No. 1 (Maret, 2016): 68.

<sup>3</sup> Shanti Veronica br Siahaan, Benedhikta Kikky, "Analisis Pemilihan Pengurus dan Unit Usaha BUMDes Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat," dalam *BUMDes* (Samarinda: SNSEBATIK, 2020): 13.

desa maupun masyarakat desa dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes sangat berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial yang membawa perubahan interaksi antar warga dan juga memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pengelolaan BUMDes Dasawarsa *Corporation* Desa Waru Barat Kec. Waru Kab. Pamekasan pada bidang ekonomi dan sosial berdampak positif pada perekonomian desa baik secara langsung maupun tidak langsung dan keterlibatan masyarakat memberi dampak positif terhadap perekonomian desa.

Selain dalam Penerapan tata kelola yang dilakukan, BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDES diatur dalam dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan BUMDES yaitu mengoptimalkan pengelolaan asset-aset yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan desa. Sifat usaha BUMDES adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan.<sup>4</sup>

BUMDES dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. BUMDES sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commencial instituion*) berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai

---

<sup>4</sup>Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Journal Of Ruler and Development* V, No. 1 (Februari, 2014): 2.

lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.<sup>5</sup>

Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa. Desa dapat mendirikan BUMDesa dengan mempertimbangkan (1) Inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa; (2) potensi usaha ekonomi desa; (3) sumberdaya alam di desa; (4) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan (5) penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa. Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang pedoman tata tertib dana mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.<sup>6</sup>

Beberapa penelitian yang telah dilakukan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Keterkaitan ini dilihat dari persamaan dalam pemilihan objek penelitian yaitu BUMDes serta menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan BUMDes, terutama dari aspek pengelolannya. Selain persamaan, ada pula perbedaan yaitu pada teori yang digunakan penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu konsep manajemen yang meliputi empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pengarahan, dan tahap

---

<sup>5</sup>Komang Sahit Utami, Lulup Endah Tripalup, Made Ary Meitriana, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggoita di Tinjau Melalui Kewirausahaan Sosial," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 11 No. 2 (2019): 502.

<sup>6</sup>Oemar Moechthar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 330.

pengawasan. Prinsip-prinsip pengelolaan meliputi kooperatif, partisipatif, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel. Alasan kenapa peneliti tertarik untuk meneliti BUMDes Dasawarsa *Corporation* Desa Waru Barat Kec. Waru Kab. Pamekasan dikarenakan. Pertama, dalam pengelolaan BUMDes Dasawarsa *Corporation* Desa Waru Barat menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan yang memang sangat penting untuk diterapkan. Kedua, BUMDes Waru Barat menjadi salah satu parameter pembangunan perekonomian baik secara mikro ataupun makro. Ketiga, BUMDes Waru Barat mampu mensejahterakan masyarakatnya melalui pengelolaan yang dilakukan secara sosial, dan mampu meningkatkan perekonomian desa. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti mengambil dengan judul tentang **“Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes Dasawarsa *Corporation* Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan ”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Dasawarsa *Corporation* di Desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Dasawarsa *Corporation* dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan pada BUMDes Dasawarsa *Corpration* di Desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan yang dilakukan pada BUMDes Dasawarsa *Corporation* di Desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menyempurnakan penelitian terdahulu yang membahas tentang Prinsip-prinsip Pengelolaan, khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
  - b. Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan kajian literatur tentang Prinsip-prinsip Pengelolaan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi Ekonomi Syariah.
  - d. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis  
Menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan pengetahuan yang baik melalui penelitian yang dilakukan.

b. Bagi BUMDes

Penelitian diharapkan memberikan masukan mengenai tata kelola BUMDes Dasawarsa *Corpration* Desa Waru Barat Kec. Waru Kab. Pamekasan agar lebih baik.

c. Bagi peneliti lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk mencapai pemahaman mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang di definisikan agar lebih dapat dipahami sebagai berikut:

1. Prinsip

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.<sup>7</sup>

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengadilan/ pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif.<sup>8</sup>

3. BUMDes

Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum yang

---

<sup>7</sup>Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 42.

<sup>8</sup> Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 14.

dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa.<sup>9</sup>

#### 4. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

#### 5. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

#### 6. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

### **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian ini yang berjudul prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Dasawarsa *Corporation* dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan. Penulis memaparkan beberapa penelitian

---

<sup>9</sup> Sitti Jamilah Amin dan An Ras Try Astuti, *Modul Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Prepare Sulawesi Selatan: Prepare Nusantara Press, 2019), 2.

<sup>10</sup> *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 12.



terdahulu yang pernah penulis baca dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

Pertama, Ismi Marifah (2019) dengan Judul skripsi “Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”<sup>11</sup> dalam penjelasan skripsi tersebut menjekaskan bahwa Pembangunan merupakan sebuah cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di Indonesia saat ini tidak hanya dilakukan di kota-kota besar tetapi juga di desa. Desa merupakan tingkat pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, sebab pembangunan di desa secara langsung berkenaan dengan masyarakat. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai jalan membangun perekonomian desa saat ini telah gencar dilaksanakan diberbagai wilayah di Indonesia. Dalam pembentukan tata kelola yang baik merupakan serangkaian proses pembuatan keputusan dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, *governance* merupakan seluruh rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan dari suatu organisasi. Dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Tata kelola BUM Pekon erat kaitannya dengan pelaksanaan manajemen yang baik dengan menerapkan sistem tata kelola yang bersifat *Good Corporate Governance* sehingga mampu mengatur BUM Pekon tersebut dengan baik dan benar.

---

<sup>11</sup>Ismi Masrifah, “Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus” (Disertasi, Universitas Lampung, 2019), 33.

Kedua, Rismawati (2018) dengan judul skripsi “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”.<sup>12</sup>Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwasanya dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada tingkat regional, nasional, maupun global. Pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yakni usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat secara keseluruhan dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan. Dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Desa Tambaksari merupakan merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.

Ketiga, M. Finsa Bagus Prastantio dan M. G. Wi Endang N. P. (2015) dengan Judul jurnal “*Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)*”<sup>13</sup> dalam penjelasan jurnal tersebut bahwasanya perekonomian adalah suatu bentuk sistem yang memiliki fungsi dalam mengatur serta menjalin kerjasama pada bidang perekonomian, dilakukan melalui hubungan antara

---

<sup>12</sup>Rismawati, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Pamekasan” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 45.

<sup>13</sup>M. Finsa Bagus Prastantio, M. G. Wi Endang N. P., “Analisis *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 27 No. 2, (Oktober 2015): 234.

manusia maupun antar lembaga yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat yang berkembang secara turun-temurun disuatu tempat. Memasuki sekitar tahun 1990-an, Indonesia diterpa masalah krisis yang berkepanjangan yang berujung pada terjadinya pergolakan dari berbagai elemen masyarakat kepada pemerintah yang menyerukan tuntutan terhaap penerapan *Good Corporate Governance*. tuntutan penerapan GCG terhadap seluruh perusahaan di Indonesia tersebut dimaksudkan perusahaan Indonesia tidak tertekan oleh perusahaan asing dan persaingan global yang semakin berat. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam penerapan *Good Corporate Governance* perusahaan memiliki keuntungan bersih dan kinerja perusahaan yang baik, sehingga perusahaan mampu menutupi biaya operasional mereka dengan baik.

Keempat, Ana Milatussholihah (2019) dengan Judul Skripsi “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati”.<sup>14</sup> dalam penjelasan skripsi tersebut menjelaskan bahwasanya sebagai pemerintahan bahwa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemerintahan desa seringkali menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai seberapa berhasil pemerintah dalam melakukan pelayanan masyarakat. Pemahaman dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki para aparat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

---

<sup>14</sup>Ana Milatussholihah, “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati” (Disertasi, UIN Walisongo, Semarang, 2019), 88.

Dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dispermades) Pati Mukhtar mengatakan pengalokasian dana yang turu ke desa setiap kabupaten itu dari pemerinyah pusat. Dengan jumlah dana desa yang berjumlah banyak, maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya.

Kelima, Putri Ilhamna (2019) dengan Judul Skripsi “Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah (Studi Pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Loknga Kabupaten Aceh Besar).”<sup>15</sup> Dalam penjelasan skripsi tersebut menjelaskan bahwasanya mengacu pada asas-asas *Good Corporate Governance* yang telah diterapkan pada pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaaan. Seiring berjalannya waktu perkembangan lembaga-lembaga syariah juga semakin pesat, ini berarti dibutuhkan suatu tata kelola yang baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Aceh merupakan daerah yang identik dengan nilai-nilai syariah baik itu dalam sistem pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari, tentu saja penerapan nilai-nilai syariah islam tersebut dapat diimplementasikan pada setiap lembaga yang ada di Aceh termasuk salah satunya pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

---

<sup>15</sup>Putri Ilhamna, “Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah (Studi Pada BUMG Desa Meunasah Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”(Disertasi, UIN An-Raniry Banda Aceh, 2019), 45.

(BUMG) yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah atau sesuai dengan *good governance* berbasis syariah.

**Tabel.1Kajian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ismi Marifah	Skripsi “Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”.	Sama-sama menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).	Terdapat pada tempat dan pada studi kasusnya, dimana penulis di daerah Waru Barat Kabupaten Pamekasan studi kasusnya dilakukan di BUMDes Dasawarsa <i>Corporation</i> desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan. Sedangkan, skripsi Ismi Marifah meneliti di daerah Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan studi kasusnya di lakukan di Badan Usaha

				Milik Pekon Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
2	Rismawati	Skripsi “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”	Sama-sama menjelaskan tentang prinsip pengelolaan BUMDes dalam upaya meningkatkan masyarakat.	Terdapat pada tempat dan pada studi kasusnya, penulis di daerah Waru Barat Kabupaten Pamekasan studi kasusnya dilakukan di BUMDes Dasawarsa <i>Corporation</i> desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan. Sedangkan, Skripsi Rismawati melakukan penelitian pada BUMDes Perwitasari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
3	M. Finsa Bagus Prastantio dan M. G. Wi Endang N. P.	Judul jurnal “ <i>Analisis Good Corporate Governance</i> Untuk	Sama-sama menjelaskan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Terdapat pada tempat dan pada studi kasusnya, dimana penulis

		Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)”	(GCG) untuk mewujudkan kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.	di daerah Waru Barat Kabupaten Pamekasan studi kasusnya dilakukan di BUMDes Dasawarsa Corporation desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan. Sedangkan, jurnal M. Finsa Bagus Prastantio dan M. G. Wi Endang N. P. Melakukan penelitian PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.
4	Ana Milatussholihah	Judul Skripsi “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kebowan Kecamatan	Sama-sama menjelaskan tentang prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau	Terdapat pada tempat dan pada studi kasusnya, dimana penulis di daerah Waru Barat Kabupaten Pamekasan studi kasusnya dilakukan di BUMDes Dasawarsa Corporation

		Winong Kabupaten Pati”	wilayah.	desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan. Sedangkan, skripsi Ana Milatussholihah melakukan penelitian di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
5	Putri Ilhamna	Judul Skripsi “Tata Kelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Berbasis Syariah (Studi Pada BUMG Desa Meunasah Moncut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)”	Sama-sama mengacu pada asas-asas <i>good corportae governance</i> yang telah diterapkan dalam pedoman umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia.	Terdapat pada tempat dan pada studi kasusnya, dimana penulis di daerah Waru Barat Kabupaten Pamekasan studi kasusnya dilakukan di BUMDes Dasawarsa <i>Corporation</i> desa Waru Barat Kabupaten Pamekasan. Sedangkan, skripsi Putri Ilhamna melakukan penelitian pada BUMG Desa Meunasah



				Mon Cut Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------